

Richard William Tuding Kuasa Hukum PT. TGM Pantasnya Jadi Dukun !!

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.MATAPUBLIK.CO.ID

Oct 23, 2022 - 20:11



Kuasa Hukum PT KMI, Ricard Wiliam bersama Fatner

PALANGKA RAYA - Menanggapi tudingan Kuasa Hukum PT. Tuah Globe Mining (TGM) Onggo, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PT. KMI (Richard William) menyebarkan berita Hoax.

Selain itu pihak Kuasa Hukum PT. TGM menguraikan bahwa terbitnya SK Pengesahan Akta nomor 05 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris ELLYS NATHALINA, SH Notaris Palangkaraya dikarenakan Terganjal oleh adanya Akta nomor 03 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris WAHYU AMANATI, SH., M.KN Notaris Sukabumi.



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 29 September 2022

Nomor : B/2115-b/IX/WAS.2.4/2022/Divpropam
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Penanganan Dumas (SP3D).

Kepada

Yth. RICHARD WILLIAM

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Surat Pelimpahan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: R/ND-2049-b/IX/WAS.2.4./2022/Bagyanduan, tanggal 28 September 2022 perihal pelimpahan pengaduan masyarakat Richard William.
2. Sehubungan dengan rujukan hal tersebut diatas, disampaikan kepada pelapor/pengadu bahwa Bagyanduan Divpropam Polri telah menindaklanjuti laporan pelapor/pengadu dengan melimpahkan laporan tersebut ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri untuk ditindak lanjuti.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri akan menyampaikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan penanganan yang telah dilakukan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2), selanjutnya terkait dengan laporan/pengaduan dapat menghubungi di Nomor Telepon (081398332594).
4. Surat ini hanya pemberitahuan kepada pelapor/pengadu dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peradilan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
MARKAS BESAR
KEPALA BAGIAN PELAYANAN PENGADUAN
u.b.
KEPALA SUB BAGIAN PENERIMAAN LAPORAN
LEONARD SIAHAAN, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76071043

"Dan hal tersebut diuraikan udah dilaporkan ke Mabes Polri dan masih dalam proses hukum di Bareskrim Mabes Polri terkait adanya pemalsuan Akta," tulisnya kepada media ini, Minggu (23/10).

Maka oleh karena itu Notaris ELLYS NATHALINA, SH membuatkan Akta Penetapan nomor 54 tanggal 31 Juli 2019, dan di Klaim keluar SK Pengesahan Nomor: AHU.01.02.TAHUN 2019, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Agustus 2019.

Disini terlihat jelas menurut Richard, bahwa kuasa hukum pihak PT.

TGM pantasnya jadi dukun.

Dijelaskan oleh Richard, bagaimana mungkin dasar penerbitan Akta Penetapan nomor 54 tanggal 31 Juli 2019 yang menetapkan Akta nomor 5 tanggal 06 Mei 2019 bisa terbit, dan apalagi dijadikan dasar Laporan hingga terbitnya Putusan yang memenangkan Laporan PT. TGM.

Sedangkan dasar terbitnya Akta Penetapan atas Akta nomor 5 tanggal 06 Mei 2019 masih dalam proses hukum di Bareskrim Mabes Polri.



"Maka semua orang awampun pasti bisa menilai, kalau tidak direayasa perkaranya. Pastilah semua sudah pada jadi Dukun", sebut Richard Wiliam, Kuasa Hukum PT KMI ini.

Dikarenakan udah pada tahu kalau Akta nomor 03 tanggal 28 Mei 2018, yang dikatakan Pasti nantinya akan Di Vonis Palsu. Dan kalau ternyata Akta tersebut dikemudian hari dinyatakan Asli oleh Putusan Pengadilan. Berarti Pemidanaan Klien kami selama ini bagaimana namanya? kalau bukan korban Kriminalisasi!

Terkait hal tersebut Richard selaku Kuasa Hukum Wang Xiu Juan Alias Susi sudah melaporkan ke SPKT Mabes Polri, namun terganjal oleh adanya Konseling Fiktif yang diduga dibuat oleh Oknum SPKT dan atau Penyidik

"Bagian Konseling Bareskrim Polri. Dan hal tersebut sedang ditangani oleh Paminal Mabes Polri," tegasnya.

Akhir kata, kuasa hukum PT KMI, mari kita hentikan Pembodohan Publik ala Sambol!